

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang, sistem informasi semakin berperan penting untuk perusahaan maupun organisasi, terutama dalam memperlancar aliran informasi, menjaga kualitas, dan menjalin kerja sama dengan pihak lain. Teknologi informasi diharapkan dapat mendukung pekerjaan, memproses dan mengolah data-data penting, serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

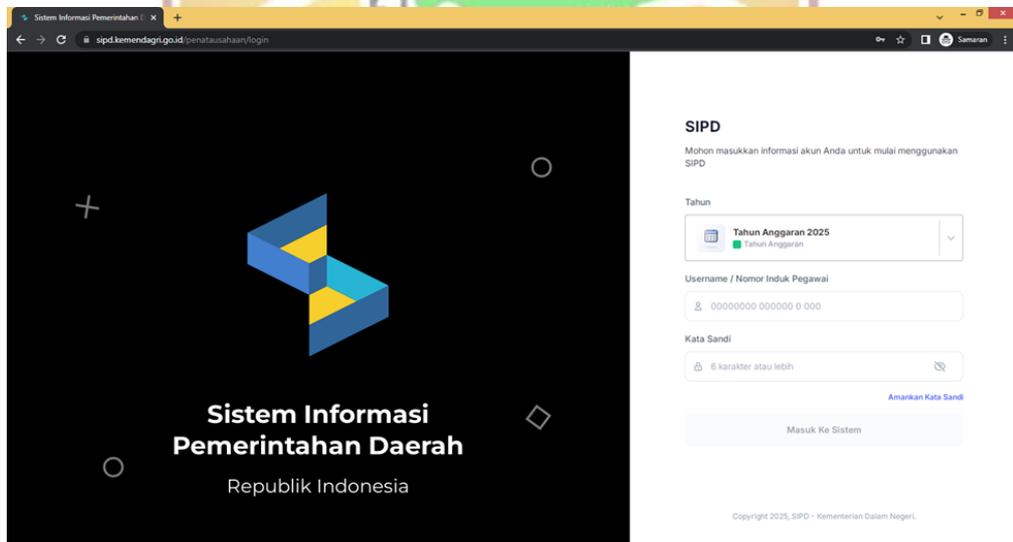
Akuntansi pemerintah merupakan sistem pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Akuntansi pemerintahan berperan penting pada pengelolaan keuangan negara. Menjadi bagian dari sistem informasi keuangan publik, akuntansi pemerintahan bertujuan untuk menyediakan laporan keuangan yang transparan, akurat, serta bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini diperlukan untuk memastikan jika semua pengeluaran negara mengikuti peraturan yang diterapkan dan dapat diaudit secara efektif.

Dalam struktur pemerintahan daerah, BPKAD menjadi institusi utama yang berkewajiban saat mengontrol keuangan serta aset daerah. BPKAD memiliki tugas dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan keuangan daerah, jadi diperlukan sistem yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan fungsi tersebut.

Salah satu inovasi yang diterapkan saat mendukung tata kelola keuangan daerah yang semakin baik termasuk pemakaian aplikasi SIPD. Sebelum adanya SIPD, pengontrolan data pemerintahan daerah dilakukan secara manual atau melalui sistem yang tidak terintegrasi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam pengambilan keputusan, tumpang tindih kebijakan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu,

pemerintah pusat menginisiasi pengembangan SIPD sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

SIPD merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah dalam satu platform digital. Aplikasi ini bertujuan untuk menyelaraskan tata kelola keuangan daerah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan dalam pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan daerah. Implementasi SIPD dalam akuntansi pemerintahan di BPKAD memberikan berbagai manfaat, seperti percepatan proses penganggaran, efisiensi dalam pencatatan transaksi keuangan, serta kemudahan dalam pelaporan dan analisis keuangan daerah. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti adaptasi terhadap sistem baru, peningkatan kapasitas SDM, serta kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai.



Gambar 1. 1 Tampilan Website SIPD BPKAD Sumatera Barat

Setelah terbitnya PERMENDAGRINomor 70 Tahun 2019 serta Surat Edaran MENDAGRI RI Nomor 130/736/SJ menyangkut kelajuan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada 27 Januari 2020,

pemerintah daerah pada seluruh Indonesia diwajibkan memakai aplikasi SIPD untuk menyusun informasi pembangunan serta keuangan daerah.

Pemerintah Kota Padang tergolong suatu daerah yang sudah memakai SIPD, terutama yang dikontrol dari BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengikuti amanat dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 menyangkut Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai akuntansi pemerintahan, peran BPKAD, serta penerapan SIPD sangat penting dalam rangka menciptakan sistem keuangan daerah yang semakin baik, transparan, serta akuntabel. Melalui penjelasan dan memperhatikan alasan diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana penggunaan SIPD pada proses akuntansi pemerintahan pada BPKAD. Dengan latar belakang sebelumnya, sehingga penulis ingin agar mengangkat judul “Implementasi SIPD Pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari hal tersebut, penelitian ini akan merumuskan beberapa pertanyaan seperti:

1. Bagaimana penerapan SIPD dalam sistem akuntansi pemerintahan di BPKAD?
2. Apa saja kendala yang dihadapi saat penggunaan SIPD di BPKAD?
3. Bagaimana SIPD dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berguna agar:

1. Menganalisis penerapan SIPD dalam sistem akuntansi pemerintahan di BPKAD, termasuk bagaimana sistem ini diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penggunaan SIPD di BPKAD, baik dari segi teknis, sumber daya manusia, maupun regulasi yang berlaku.

3. Mengevaluasi sejauh mana SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses akuntansi pemerintahan, serta bagaimana sistem ini berkontribusi terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diinginka membagikan manfaat bagi berbagai pihak, baik teoritis juga praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan, khususnya terkait implementasi sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

1. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas dan tantangan dalam penerapan SIPD.
2. Memperkaya literatur akademik mengenai sistem informasi dalam pemerintahan daerah, terutama dalam kaitannya dengan peran BPKAD.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Menambah pemahaman yang semakin mendalam kepada BPKAD terkait efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Menolong pihak pemerintah daerah saat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan SIPD serta memberikan rekomendasi perbaikan.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan optimalisasi sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini tersusun dengan rapi dan mudah dipahami, pembahasannya dipisahkan pada bab-bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang pentingnya penerapan SIPD dalam akuntansi pemerintahan serta alasan dilakukannya penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori yang bersangkutan pada topik penelitian, seperti konsep akuntansi pemerintahan, peran BPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah, serta SIPD. Disamping hal tersebut, bab ini pula mengulas beberapa penelitian sebelumnya sesuai.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Bab ini menjelaskan menyangkut profil institusi yang berisi penjelasan umum tentang BPKAD, kegiatan BPKAD, visi misi, sejarah institusi biasanya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian terkait penerapan SIPD di BPKAD, termasuk berbagai kendala yang ditemui serta analisis terhadap sejauh mana sistem ini efektif saat menaikkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Data yang sudah diperoleh lalu dianalisis serta diinterpretasikan agar menjawab rumusan masalah untuk penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan oleh hasil penelitian serta saran yang bisa dibagikan sesuai hasil analisis. Kesimpulan yang disampaikan berguna agar menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan dahulunya, sedangkan saran diberikan untuk perbaikan dan optimalisasi penerapan SIPD di BPKAD maupun instansi pemerintah daerah lainnya.

Dengan sistematika ini, diharapkan penelitian dapat tersusun dengan baik dan memberikan informasi yang jelas serta bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam pemerintahan daerah.